

Panen Raya Pangan Pacu Deflasi Kota Madiun

Madiun, Memorandum

Kota Madiun kembali mencatatkan deflasi pada Juli 2026. Kondisi pasokan komoditas pangan yang melimpah menjadi faktor penyebabnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,12 persen secara bulanan (*month to month/m-to-m*).

Ini menjadi deflasi ketiga yang terjadi di Kota Madiun sepanjang tahun ini, setelah Januari sebesar 0,23 persen dan April sebesar 0,02 persen.

Kepala BPS Kota Madiun Abdul Azis menjelaskan, peningkatan pasokan hortikultura, khususnya bawang merah dari sejumlah sentra produksi, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan harga di tingkat konsumen.

“Pasokan hortikultura meningkat karena panen raya bawang merah di sejumlah sentra produksi sehingga harga



Komoditas bawang merah dan cabai rawit menjadi penyumbang deflasi Kota Madiun pada Juli 2026.

di tingkat konsumen turun,” ujarnya, Rabu (5/8).

Menurut Azis, komoditas bawang merah memberikan kontribusi paling besar setelah harganya turun hingga 29,60 persen atau menyumbang def-

lasi sebesar 0,19 persen.

Selain bawang merah, penurunan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas lain seperti cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, cabai merah, semangka, daging ayam ras,

emas perhiasan, serta tarif kereta api.

Di sisi lain, beberapa komoditas masih mengalami kenaikan harga. Di antaranya bensin, beras, biaya pendidikan taman kanak-kanak, ketimun, sepeda

motor, laptop, dan daging sapi.

Kenaikan tersebut turut menahan laju deflasi agar tidak lebih dalam.

Secara kumulatif, inflasi Kota Madiun selama Januari hingga Juli 2026 tercatat sebesar 1,60 persen. Adapun inflasi tahunan (*year on year/yooy*) mencapai 2,86 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Timur sebesar 2,87 persen maupun nasional yang berada di angka 2,88 persen.

Meski perkembangan harga pangan saat ini relatif terkendali, BPS mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi tekanan inflasi pada paruh kedua tahun ini.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bank Indonesia, fenomena El Nino dan ketidakpastian geopolitik global masih berpotensi memengaruhi pasokan sejumlah komoditas pada bulan-bulan mendatang,” pungkas Azis. (**ggi/nov**)



Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono saat melantik PNS tahun 2026.

Sebanyak 228 Orang Resmi Dilantik Jadi PNS

Ngawi, Memorandum

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono resmi melantik sebanyak 228 Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026 di Kabupaten Ngawi.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menjelaskan, bahwa tahun ini sebanyak 228 PNS yang dilantik meliputi jabatan fungsional tertentu sebanyak 175 orang terdiri dari 82 orang JFT berada di dinas kesehatan dengan jabatan dokter spesialis, dokter umum, perawat, nutrisi-onis, serta JFT lainnya.

Sedangkan 93 orang berada di lingkup organisasi perangkat daerah di luar dinas kesehatan. Kemudian jabatan fungsional umum sebanyak 53 orang yang tersebar dalam 30 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Ngawi. “Jadi ada 228 orang yang kita lantik menjadi PNS,” katanya.

Ony menuturkan, dengan dilantik PNS di Ngawi ini

nantinya dapat mengakselerasi apa yang menjadi visi misi kepala daerah baik bupati dan wakil bupati terhadap pelayanan publik bagus lagi, serta pembangunan daerah serta mempunyai integritas yang baik sehingga dapat memunculkan kepercayaan di masyarakat.

Memang saat ini rata-rata usianya masih muda atau Gen Z ini ke depannya harus mempunyai semangat juga muncul inovasi-inovasi baru untuk membangun Kabupaten Ngawi yang siap untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Ia menambahkan, nantinya jaminan karier di Kabupaten Ngawi cukup lebar karena sudah menerapkan manajemen talenta sehingga tidak akan ada kekhawatiran dalam melaksanakan pengabdian di Kabupaten Ngawi.

“Kami ingin PNS baru ini dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat juga terobosan inovasi untuk Kabupaten Ngawi,” pungkasnya. (**ris/dik/nov**)

Kejari Kabupaten Madiun Musnahkan Barang Bukti

Madiun, Memorandum

Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun kembali melakukan pemusnahan barang bukti yang telah dinyatakan rampung, Rabu (5/8).

Barang bukti yang dimusnahkan terdiri berbagai macam dengan perkara pidana umum yang telah *inkracht* periode Mei sampai dengan Juli 2026 dengan total 31 perkara.

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Pemulihan Aset Kejari Kabupaten Madiun Bagas Andy Setiawan mengungkapkan, pada kegiatan pemusnahan barang bukti kali ini, untuk tindak narkotika ada berupa sabu dengan berat 11,071 gram, pakaian 12lembar, elektronik berupa ponsel genggam 6 buah, dan juga timbangan elektronik.

Selain itu juga ada pemusnahan dokumen berupa KTP dan ATM serta perkakas untuk alat konsumsi narkotika.

“Pemusnahan barang bukti ini tujuannya bagian dari eksekusi, jadi Jaksa selain bertugas sebagai eksekusi pidananya, juga terhadap eksekusi barang buktinya. Kegiatan rutin ini dilakukan terhadap barang bukti yang



Kejari Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti yang sudah *inkracht*, Rabu (5/8).

amar putusannya dirampas untuk dimusnahkan,” jelasnya.

Bagas menyampaikan, dalam periode tiga bulan terakhir ini kasus pidana yang paling mendominasi adalah dari tindak pidana narkotika dan perlindungan anak.

Sementara untuk penanganan perkara di bidang umum, sambung-nya, mengikuti dinamika masyarakat,

terutama dari penyidik Polri maupun PPNS yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan setempat.

“Jadi khusus dari barang bukti sendiri dari bidang kami, kami menerima penyelesaian dari bidang teknis terhadap perkara yang sudah *inkracht* tersebut,” terangnya.

Di samping itu, Bagas menyebutkan, selain pemusnahan hingga tak

tersisa, beberapa barang bukti juga dikembalikan kepada pemiliknya sesuai amar putusan yang ditetapkan. Baik kepada terdakwa, saksi, maupun lain sebagainya.

“Kalau diputuskan dikembalikan, kami kembalikan langsung kepada pemiliknya sesuai putusan, biasanya melalui kegiatan perintis atau pengembalian barang bukti gratis. Kemudian yang terakhir barang bukti yang dirampas negara penyelesaiannya melalui lelang atau penjualan langsung,” tandasnya. (**aji/nov**)

Capaian IKD di Ngawi Masih Rendah

Ngawi, Memorandum

Capaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Ngawi masih rendah.

Hingga saat ini dari total target nasional sebesar 30 persen baru mencapai 5 persen.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Ngawi Noor Hasan Muntaha mengatakan, bahwa hingga saat ini untuk capaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Ngawi belum mencapai target nasional.

“Dari target nasional sebesar 30 persen dengan total jumlah wajib KTP di Ng-



Kepala Dispendukcapil Ngawi Noor Hasan Muntaha

awi yang mencapai 780.000 jiwa, saat ini baru mencapai 5 persen,” katanya.

Ia menyampaikan, bahwa pihaknya akan berupaya meningkatkan cakupan IKD kepada masyarakat. Sebab, ke depannya IKD bisa menjadi kunci bagi masyarakat untuk mendapatkan ban-



Warga Ngawi saat melakukan aktivasi IKD di Mal Pelayanan Publik (MPP).

tuhan dari pemerintah pusat.

“Dalam konteks satu data semua sudah terintegrasi dengan data lainnya yang berisi KTP-e digital, kartu keluarga, akta kelahiran, surat pindah, dan KIA,” ujarnya.

Sejauh ini, dispendukcapil sudah berkirir surat

ke kecamatan untuk disampaikan ke pemerintah desa agar meningkatkan cakupan IKD ke masyarakat desa di wilayah Ngawi.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengejar cakupan IKD tersebut,” pungkasnya. (**ris/dik/nov**)

Dinsos Kabupaten Madiun Optimalkan Sosialisasi SRT

Madiun, Memorandum

Kuota Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Madiun masih lowong.

Dari total kemampuan menampung 1.200 siswa, kini hanya terisi sekitar 261 siswa asli Kabupaten Madiun.

Perinciannya, jenjang SD diduduki oleh 57 siswa, SMP 114 siswa, dan SMA 90 peserta didik.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun Supriyadi mengaku masih memaklumi capaian tersebut. Mengingat, program SRT baru mulai *running* tahun ini.



Para siswa SRT 1 Kabupaten Madiun.

“Karena masih baru berjalan. Berikut-berikutnya akan kami tingkatkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurut Supriyadi, tidak ada kendala khusus secara

teknis dalam pemenuhan kuota siswa SR. Hanya saja, ia berdalih, karena program baru, sehingga proses sosialisasi cenderung kurang masif di tingkat masyarakat.

“Pada prinsipnya, SR itu berbeda dengan sekolah biasa. Kalau sekolah yang lain itu siswa yang datang. Tetapi kalau di Sekolah Rakyat ini, kita melakukan penjangkauan kepada mereka-mereka yang sekiranya tidak mampu,” terangnya.

Dia memastikan pihaknya bakal terus berupaya memenuhi total kuota yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti, melakukan penjangkauan calon siswa melalui data *by name by address* dari Kementerian Sosial. Sekaligus, memperluas cakupan seleksi calon siswa. (**aji/nov**)



Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun memimpin rakor LPMK di Rumah Dinas, Rabu (5/8).

Pemkot Madiun Rangkul LPMK untuk Kelola Sampah

Madiun, Memorandum

Pemkot Madiun terus bergerak cepat dalam menangani persoalan pengelolaan sampah.

Pasca-pencanangan program Pilah dari Rumah, kini pemkot merangkul Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk ikut memuluskan pelaksanaan program tersebut.

Langkah percepatan ini diambil mengingat kondisi TPA saat ini membutuhkan intervensi nyata dan respons cepat dari seluruh elemen masyarakat.

“Saya mau melibatkan semuanya, selain Pendekar Hijau, teman-teman LPMK di masing-masing kelurahan ini juga ingin ikut membantu,” kata Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun

usai rakor LPMK di Rumah Dinas, Rabu (5/8).

Bagus mengapresiasi LPMK yang sedia mengabdikan diri untuk terlibat dalam menyelesaikan persoalan sampah. Keikutsertaan LPMK dalam mengawal program pengelolaan lingkungan ini murni berasal dari inisiatif lembaga itu sendiri tanpa adanya permintaan resmi sebelumnya.

“Dengan kondisi TPA hari ini, kita kan harus bergerak cepat. Sehingga saya berharap teman-teman LPMK ini langsung bisa melebur. Nanti kelurahan ikut mengawasi, membantu,” ujarnya.

Selain persoalan lingkungan, pemkot juga fokus pada penataan regulasi keuangan daerah dalam rakor bersama LPMK. Pun melakukan

moratorium guna mematangkan formula terbaik terkait skema keuangan dan fasilitas pinjaman bagi masyarakat maupun stakeholder daerah.

Bagus menyebut Disnaker KUKM telah berkoordinasi dengan BPK dan saat ini melanjutkan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait regulasi perbankan.

Termasuk skema pinjaman yang akan diarahkan melalui BPR Bank Daerah demi menjamin keamanan legalitas hukum bagi para peminjam.

“Kita lagi mencari formula yang terbaik. Sehingga mana yang nanti terbaik, salah satunya kita akan arahkan semuanya ke BPR Bank Daerah,” pungkas Bagus. (**adv/ggi/nov**)